KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Cadangan tak terukur, LTJ belum beri manfaat besar
Tanggal : Minggu, 09 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cadangan Tak Terukur

LTJ Belum Beri Manfaat Besar

ANGGOTA Komisi XII DPR Jamaludin Malik meminta Pemerintah mempercepat penataan tata kelola Logam Tanah Jarang (LTJ) agar membawa manfaat bagi negara. LTJ merupakan kelompok mineral penting yang dibutuhkan untuk mesin kendaraan listrik, baterai energi, turbin angin, chip elektronik, hingga peralatan pertahanan.

Jamaludin menjelaskan, Indonesia memiliki potensi LTJ yang cukup besar, terutama dari mineral ikutan penambangan timah di Bangka Belitung (Babel). Namun sampai saat ini, potensi tersebut belum diolah dan belum memberikan nilai tambah maksimal. "Salah satu kendala utama saat ini adalah data cadangan LTJ yang belum terukur dengan pasti," ujarnya.

Jamaludin melanjutkan, banyak informasi yang masih bersifat perkiraan, sehingga negara belum dapat menentukan arah pengelolaan yang tepat. Hal itu ditambah dengan aturan teknis mengenai cara memisahkan, mengangkut, dan mengolah LTJ belum lengkap

"Utamanya karena mineral pembawa LTJ seperti monasit mengandung unsur radioaktif yang harus ditangani dengan sangat hati-hati demi keselamatan lingkungan dan masyarakat," beber anggota Fraksi Golkar ini.

Jamaludin menilai, Indonesia perlu memulai dari hal yang paling mendasar, yaitu memperbaiki data dan aturan sebelum masuk ke tahap pembangunan industri. Pemerintah perlu membangun fasilitas percontohan (pilot plant) di dalam negeri sebagai langkah awal untuk mempelajari teknologi pemurnian LTJ.

Fasilitas ini, lanjut dia, dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra teknologi. Sehingga, proses alih teknologi terjadi secara bertahap dan tidak hanya bergantung pada negara lain. "Potensi Logam Tanah Jarang jangan hanya berhenti di atas kertas," tandasnya.


SUMBER: JAMALUDIN MALIK.FB

Jamaludin Malik

Manfaat LTJ harus nyata untuk ekonomi bangsa, lapangan kerja, dan perkembangan teknologi di Indonesia. Namun, karena mengandung unsur radioaktif, pengelolaannya harus aman, diawasi, dan tidak boleh tergesa-gesa.

Dia menambahkan hilirisasi LTJ harus diarahkan bukan hanya untuk memurnikan mineral, tetapi hingga menghasilkan bahan baku magnet permanen yang menjadi komponen penting kendaraan listrik dan energi terbarukan. Dengan cara ini, nilai tambah tetap berada di dalam negeri, bukan justru dinikmati pihak luar.

"Komisi XII DPR akan terus melakukan pengawasan agar tata kelola LTJ berjalan dengan transparan, aman, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi negara dan masyarakat," harap legislator asal Dapil Jawa Tengah (Jateng) II ini.

Senada, anggota Komisi XII DPR Jalal Abdul Nasir mendorong penguasaan teknologi pengolahan LTJ secara mandiri sebelum melangkah ke tahap komersialisasi atau kerja sama strategis lintas lembaga. "Saya harap teman-teman geologi agar memperkuat dulu penguasaan teknologi sederhana yang bisa mengolah LTJ," ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Ia menyoroti praktik di Tiongkok yang telah mampu mengolah dan memisahkan LTJ menggunakan teknologi sederhana dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Akademisi dan peneliti kita diyakini punya kemampuan serupa untuk menyiapkan teknologi praktis yang bisa langsung diterapkan.

Untuk itu, perlu ada dukungan dana riset, baik dari BUMN maupun sektor swasta demi mempercepat pengembangan teknologi pengolahan LTJ di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu memproduksi sendiri bahan strategis yang bernilai tambah tinggi.

"Kalau teknologi praktisnya sudah siap, saatnya nanti ketika Presiden membutuhkan untuk keperluan strategis nasional, semua pihak sudah siap," imbuh Anggota Fraksi PKS ini.

Menurut Jalal, kesiapan teknologi di tingkat riset dan manufaktur akan memudahkan DPR dalam mengoordinasikan langkah kebijakan lintas kementerian. "Sehingga, semua bisa bergerak dengan arah yang sama," pungkasnya. ■ TIF